

**PEMAKNAAN UNSUR *NUMEROSITY* DAN *COMMONALITY* DALAM  
PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI SERTA AKIBAT HUKUMNYA  
DALAM GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK DI PENGADILAN  
NEGERI JAKARTA PUSAT**

Oleh :

Shabrina Hanifa<sup>1</sup>, Hasrul Halili<sup>2</sup>

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih jauh terkait unsur *numerosity* dan *commonality* sebagai persyaratan gugatan perwakilan kelompok dan juga implementasinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekurangan pengaturan *numerosity* dan *commonality* dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok serta akibat hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan kajian berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara serta bahan hukum sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan *numerosity* dan *commonality* sebagai persyaratan gugatan perwakilan kelompok dinilai dengan membandingkan kepraktisannya jika dibandingkan bentuk gugatan lain serta dengan menelaah fakta dan dasar hukumnya. Selain itu, PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok juga belum mengatur unsur *numerosity* dan *commonality* secara lebih lanjut sehingga di dalam praktiknya kedua unsur tersebut sulit untuk dipenuhi.

Kata kunci: Gugatan Perwakilan Kelompok, Hukum Acara Perdata, *Numerosity*, *Commonality*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Strata-1 (S-1) Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

***INTREPRETATION OF NUMEROSITY AND COMMONALITY IN  
REGULATION AND PRACTICE AND THE LEGAL EFFECTS IN CLASS  
ACTION AT CENTRAL JAKARTA DISTRICT COURT***

Oleh :

Shabrina Hanifa<sup>1</sup>, Hasrul Halili<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*This study aims to further analyze the elements of numerosity and commonality as requirements for class action and also their implementation in the Central Jakarta District Court. This study also aims to identify and analyze the deficiencies in the regulation of numerosity and commonality in PERMA No. 1 of 2002 and their legal consequences.*

*This research is a normative-empirical research that is descriptive-analytical. This study uses a study based on primary data obtained through interviews as well as secondary legal materials in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials.*

*The results of the study show that numerosity and commonality as requirements for class action lawsuits are assessed by comparing their practicality when compared to other forms of lawsuits as well as by examining the facts and legal basis. In addition, PERMA No. 1 of 2002 also has not regulated the elements of numerosity and commonality in detail so in practice these two elements are difficult to fulfill.*

Keywords: *Class Action, Civil Procedural Law, Numerosity, Commonality*

---

<sup>1</sup> Undergraduate Law Student of Civil Law, Degree Program, Faculty of Law Gadjah Mada University.

<sup>2</sup> Lecturer of Civil Law, Faculty of Law, Gadjah Mada University.